

# IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KOTA LAYAK ANAK KLASTER PERLINDUNGAN KHUSUS DI KOTA KENDARI PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Aulia Dwi Oktaviani

NPP. 32.0923

Asdaf Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara

Program Studi Studi Kebijakan Publik

Email: [32.0923@praja.ipdn.ac.id](mailto:32.0923@praja.ipdn.ac.id)

Pembimbing: Dra. Siti Zulaika, M. Si

## ABSTRACT

**Problem Statement/Background (GAP):** In the past three years, Kendari City has received the Child-Friendly City (Kota Layak Anak/KLA) award at the "Nindya" level from the Ministry of Women's Empowerment and Child Protection (Kemen PPPA). However, there is a clear discrepancy between the awarded status and the realities on the ground, particularly the high and increasing number of child abuse cases each year, with 47 cases reported in 2023. This condition indicates that the implementation of the Child-Friendly City policy, especially in the Special Protection Cluster, has not been running optimally. This issue is critical, as various forms of abuse—sexual, physical, and psychological—are mostly experienced by school-aged children who should be receiving maximum protection from the local government. **Purpose:** The purpose of this study is to examine how the Child-Friendly City Policy is implemented in the Special Protection Cluster in Kendari City, as well as to identify the supporting and inhibiting factors that influence its implementation. **Method:** This study uses a qualitative descriptive approach, which was chosen because the research problem focuses on an in-depth understanding of the implementation process of the Child-Friendly City policy, particularly in the complex and contextual Special Protection Cluster. A qualitative approach is considered appropriate as it can comprehensively describe social phenomena, policy dynamics, and influencing factors from the perspectives of policy implementers and affected communities. The data sources consist of primary data, collected through in-depth interviews with key informants, and secondary data from policy documents, official reports, news sources, and related institutions. Informants were selected using purposive sampling, targeting those directly involved in the implementation of the KLA Special Protection Cluster. Snowball sampling was used to reach additional relevant informants recommended by initial sources, and accidental sampling was used to obtain perspectives from the general public, including child abuse victims or their guardians. The selection of informants was based on their knowledge, experience, and direct involvement in policy implementation or its impact. Data were collected through three main techniques: direct observation, in-depth interviews, and documentation. The research was conducted in Kendari City, Southeast Sulawesi Province, with a primary focus on the Office of Women's Empowerment and Child Protection (DP3A) and several schools, health centers, and communities. The research was conducted in January 2025. **Result:** The results indicate that the implementation of the KLA policy in the Special Protection Cluster in Kendari City has not been optimal. In the dimension of problem characteristics, there has been an increase in child abuse cases, particularly involving school-aged children, indicating an urgent issue. In terms of policy characteristics, budget allocation has not been well optimized. Meanwhile, the policy environment is affected by social and economic factors. Several inhibiting factors include uneven socialization, limited budget, inadequate infrastructure, and low public awareness—leading to the continued increase in child abuse cases in Kendari City. On the other hand, the supporting factors include the strong commitment of the local government, cross-sector collaboration, and the presence of regulations supporting the Child-Friendly City program. **Conclusion:** This study shows that the implementation of the Child-Friendly City policy in the Special Protection Cluster in

*Kendari City has not been running optimally. This is evidenced by the persistently high and rising cases of child abuse, ineffective use of budget, and low public awareness. The main obstacles to policy implementation include insufficient socialization, lack of resources, and the influence of social and economic conditions. Nevertheless, there are supporting factors such as the local government's commitment, multi-stakeholder involvement, and supporting legal frameworks for the Child-Friendly City policy.*

**Keywords:** *Implementation, Policy, Special Protection, Child-Friendly City*

### ABSTRAK

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** Kota Kendari dalam tiga tahun terakhir menerima penghargaan sebagai Kota Layak Anak (KLA) tingkat Nindya dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA). Namun demikian, terjadi ketimpangan antara penghargaan yang diperoleh dengan realitas di lapangan, yakni tingginya angka kekerasan terhadap anak yang terus meningkat setiap tahun, tercatat 47 kasus pada tahun 2023. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan KLA, khususnya pada kluster perlindungan khusus, belum berjalan secara optimal. Permasalahan ini menjadi krusial karena bentuk-bentuk kekerasan seperti seksual, fisik, dan psikis banyak terjadi pada anak usia sekolah, yang seharusnya mendapatkan perlindungan maksimal dari pemerintah daerah.

**Tujuan:** Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi Kebijakan Kota Layak Anak pada Kluster Perlindungan Khusus di Kota Kendari serta faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan. **Metode:** Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena permasalahan yang dikaji berfokus pada pemahaman mendalam terhadap proses implementasi kebijakan Kota Layak Anak, khususnya pada kluster perlindungan khusus, yang bersifat kompleks dan kontekstual. Pendekatan kualitatif dianggap tepat karena mampu menggambarkan secara menyeluruh fenomena sosial, dinamika kebijakan, dan faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaannya melalui perspektif pelaku kebijakan dan masyarakat yang terdampak. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer, yaitu hasil wawancara mendalam dengan informan kunci dan data sekunder berupa dokumen kebijakan, laporan resmi, berita, dan data dari instansi terkait. Informan penelitian ditentukan melalui teknik *purposive sampling*, yaitu penentuan informan secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu, seperti keterlibatan langsung dalam implementasi kebijakan KLA kluster perlindungan khusus. Selanjutnya digunakan teknik *snowball sampling* untuk menjangkau informan lain yang relevan berdasarkan rekomendasi dari informan awal. Teknik *accidental sampling* juga digunakan untuk memperoleh perspektif masyarakat secara umum, terutama korban atau orang tua korban kekerasan anak. Pemilihan informan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa mereka memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung dalam pelaksanaan kebijakan maupun dampak dari kebijakan tersebut. Data dikumpulkan melalui 3 teknik utama, yaitu observasi langsung, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Penelitian dilakukan di Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara dengan fokus utama pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Kendari serta beberapa sekolah, puskesmas, dan lingkungan masyarakat yang relevan. Waktu pelaksanaan penelitian berlangsung pada bulan Januari 2025. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan KLA kluster perlindungan khusus di Kota Kendari belum berjalan optimal. Pada dimensi karakteristik masalah ditemukan peningkatan kasus kekerasan anak yang korbannya berada dalam usia anak sekolah sehingga menunjukkan masalah yang mendesak. Kemudian karakteristik kebijakan dimana anggaran dana yang belum teroptimalkan dengan baik serta dimensi lingkungan kebijakan yang dipengaruhi oleh faktor sosial dan ekonomi. Terdapat beberapa faktor penghambat yakni sosialisasi yang kurang merata, keterbatasan anggaran, sarana, dan prasarana, serta masih rendahnya kesadaran masyarakat menyebabkan peningkatan

kasus kekerasan masih terus terjadi di Kota Kendari. Sedangkan faktor pendukungnya yakni komitmen pemerintah daerah Kota Kendari dalam mendukung program, keterlibatan berbagai pihak, serta regulasi yang mendukung. **Kesimpulan:** Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Kota Layak Anak pada Klaster Perlindungan Khusus di Kota Kendari belum berjalan optimal. Hal ini ditunjukkan dengan masih tingginya angka kekerasan terhadap anak yang meningkat setiap tahun, lemahnya pemanfaatan anggaran, serta rendahnya kesadaran masyarakat. Kendala utama dalam implementasi kebijakan meliputi kurangnya sosialisasi, keterbatasan sumber daya, dan pengaruh kondisi sosial ekonomi masyarakat. Meski demikian, terdapat faktor pendukung seperti komitmen pemerintah daerah, keterlibatan lintas sektor, serta keberadaan regulasi yang mendukung kebijakan Kota Layak Anak.

**Kata Kunci : Implementasi, Kebijakan, Perlindungan Khusus, Kota Layak Anak**

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Anak merupakan individu yang belum berusia 18 tahun dan termasuk dalam kelompok rentan yang wajib mendapatkan perlindungan penuh dari kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dalam konteks ini, anak dipandang sebagai generasi penerus bangsa yang harus dijamin hak-haknya oleh negara, keluarga, dan masyarakat (Abdi, 2024). Namun, kenyataan menunjukkan bahwa angka kekerasan terhadap anak di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya. Berdasarkan data dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI-PPA), tercatat peningkatan kasus kekerasan terhadap anak sebanyak 12,8% pada tahun 2023 dibandingkan tahun sebelumnya, dengan kekerasan seksual menjadi bentuk paling dominan (Rizkiyani, 2023). Bentuk kekerasan lain seperti kekerasan fisik, psikis, penelantaran, hingga eksploitasi juga terus terjadi secara masif. Provinsi Sulawesi Tenggara menempati peringkat ke-22 dalam jumlah kasus kekerasan anak di Indonesia, dengan Kota Kendari menjadi wilayah dengan kasus tertinggi di provinsi tersebut pada tahun 2023, yakni sebanyak 47 kasus (Ningtyas, 2024).

Mirisnya, meskipun Kota Kendari mengalami peningkatan signifikan dalam jumlah kasus kekerasan anak, kota ini justru menerima penghargaan sebagai Kota Layak Anak (KLA) kategori Nindya dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun yang sama (Radar Sultra, 2021). Hal ini mencerminkan adanya ketimpangan antara prestasi administratif dan kondisi faktual di lapangan, terutama pada Klaster Perlindungan Khusus, yang bertujuan melindungi anak-anak dalam situasi khusus seperti korban kekerasan, eksploitasi, dan anak berhadapan dengan hukum (Silaban, 2023). Berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Kendari melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, seperti program sekolah ramah anak, puskesmas ramah anak, dan pelayanan konseling keluarga. Namun, implementasi program tersebut belum mampu menekan angka kekerasan secara efektif. Bahkan, sejumlah kasus kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi di Kota Kendari pada tahun 2024 sempat menjadi sorotan publik, seperti kasus pemerkosaan oleh ayah tiri dan pencabulan oleh seorang guru seni terhadap 11 anak di sebuah sekolah dasar (Yunus, 2024). Sesuai Peraturan Menteri PPPA No. 12 Tahun 2022, Klaster Perlindungan Khusus menjadi salah satu indikator utama penilaian Kota Layak Anak, sehingga lemahnya implementasi pada klaster ini dapat mengancam keabsahan penghargaan yang diberikan. Maka dari itu, untuk mewujudkan Kota Layak Anak yang benar-benar substantif dan tidak hanya seremonial, perlu dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap implementasi kebijakan KLA khususnya pada klaster ini.

Berangkat dari latar belakang tersebut, maka penting untuk menganalisis implementasi kebijakan Kota Layak Anak Klaster Perlindungan Khusus di Kota Kendari, serta faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaannya. Penelitian ini juga

menggunakan teori implementasi kebijakan dari Mazmanian & Sabatier (1983) yang menekankan pentingnya dimensi karakteristik masalah, karakteristik kebijakan, dan lingkungan kebijakan dalam keberhasilan suatu kebijakan.

## **1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)**

Permasalahan utama dalam penelitian ini berangkat dari adanya kontradiksi antara status Kota Kendari sebagai penerima penghargaan Kota Layak Anak (KLA) tingkat Nindya dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) selama tiga tahun berturut-turut, dengan realitas tingginya kasus kekerasan terhadap anak di wilayah tersebut, yang justru meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2023, Kota Kendari mencatat sebanyak 47 kasus kekerasan anak, menjadikannya sebagai daerah dengan angka kekerasan anak tertinggi di Provinsi Sulawesi Tenggara (Ningtyas, 2024). Bentuk kekerasan yang terjadi pun bervariasi, mulai dari kekerasan seksual, fisik, psikis, penelantaran, hingga eksploitasi, yang sebagian besar korbannya adalah anak usia sekolah. Kondisi ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara pencapaian administratif Kota Kendari sebagai KLA dan implementasi riil dari kebijakan tersebut di lapangan, khususnya dalam Klaster Perlindungan Khusus, yang sejatinya merupakan aspek kritis dari kebijakan KLA.

Meskipun berbagai program seperti sekolah ramah anak, puskesmas ramah anak, dan layanan konseling keluarga telah dijalankan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kendari, namun data kekerasan terhadap anak terus meningkat, dan kasus-kasus berat seperti pelecehan oleh guru atau kekerasan seksual dalam keluarga tetap terjadi (Yunus, 2024). Selain itu, hasil evaluasi Kementerian PPPA menunjukkan bahwa Provinsi Sulawesi Tenggara, termasuk Kota Kendari, masuk dalam kategori rendah untuk indeks pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus (Kemen PPPA, 2023). Hal ini memperkuat indikasi bahwa implementasi kebijakan belum berjalan optimal, terutama pada dimensi karakteristik masalah yang kompleks, belum optimalnya karakteristik kebijakan, serta pengaruh lingkungan sosial ekonomi masyarakat—sebagaimana dianalisis melalui teori implementasi kebijakan dari Mazmanian dan Sabatier.

Oleh karena itu, permasalahan ini menjadi krusial untuk diteliti secara mendalam karena menyangkut kredibilitas pelaksanaan kebijakan publik yang berkaitan langsung dengan hak dasar anak. Ketimpangan antara pencapaian simbolis berupa penghargaan dan kenyataan maraknya kekerasan terhadap anak menunjukkan bahwa keberhasilan administratif belum tentu merepresentasikan keberhasilan substantif dalam perlindungan anak. Penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji secara kritis sejauh mana kebijakan Kota Layak Anak, khususnya pada Klaster Perlindungan Khusus, telah diimplementasikan di Kota Kendari, serta untuk mengidentifikasi hambatan dan faktor pendukung yang memengaruhi efektivitas kebijakan tersebut. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan ilmu kebijakan publik, sekaligus menjadi rujukan praktis bagi pemerintah daerah dalam memperbaiki sistem perlindungan anak yang lebih responsif, inklusif, dan berbasis kebutuhan nyata di masyarakat. Selain itu, temuan penelitian ini juga diharapkan dapat mendorong adanya evaluasi menyeluruh terhadap indikator-indikator penilaian Kota Layak Anak agar tidak hanya berorientasi pada pemenuhan dokumen administratif, tetapi juga berfokus pada dampak riil terhadap kesejahteraan dan perlindungan anak.

## **1.3 Penelitian Terdahulu**

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas implementasi kebijakan Kota Layak Anak (KLA) di berbagai daerah. Nurhayati et al (2024) dalam penelitiannya mengenai implementasi KLA di Kota Makassar menemukan bahwa pelaksanaan kebijakan belum optimal. Hal ini disebabkan oleh lemahnya dimensi lingkungan kebijakan yang dipengaruhi

oleh kondisi sosial ekonomi masyarakat serta rendahnya kualitas sumber daya manusia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teori implementasi Mazmanian & Sabatier (1983), serta teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Fokus penelitian mereka berada pada keseluruhan klaster KLA, sehingga berbeda dengan penelitian ini yang berfokus pada Klaster Perlindungan Khusus. Penelitian oleh Mahmud & Suandi (2020) mengenai pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak di Kota Palembang menunjukkan bahwa implementasi kebijakan berjalan cukup baik secara umum. Namun, ditemukan kendala pada aspek komunikasi antarlembaga pelaksana, kapasitas kelembagaan, serta kondisi sosial ekonomi dan politik yang memengaruhi pelaksanaan kebijakan. Perbedaan yang mencolok dari penelitian ini terletak pada penggunaan teori Van Metter dan Van Horn, serta objek penelitian yang menekankan pemenuhan hak anak secara umum, tidak secara khusus pada klaster tertentu.

Elizabeth & Hidayat (2016) dalam penelitiannya di Kota Bekasi menyimpulkan bahwa Pemerintah Kota Bekasi telah menunjukkan komitmen terhadap pelaksanaan program KLA, namun masih terdapat kendala seperti terbatasnya fasilitas yang ramah anak dan lemahnya perlindungan hukum. Penelitian ini memiliki persamaan dari sisi pendekatan kualitatif dan tema kebijakan KLA, tetapi tidak secara eksplisit menggunakan teori implementasi tertentu dan tidak fokus pada Klaster Perlindungan Khusus. Penelitian oleh Harianti et al (2020) yang juga dilakukan di Kota Kendari menemukan bahwa implementasi KLA belum optimal, terutama dalam hal koordinasi antara instansi terkait dan pencapaian indikator-indikator ramah anak. Meskipun penelitian ini dilakukan pada lokasi yang sama dengan penelitian ini, fokus mereka bersifat umum terhadap pelaksanaan KLA secara keseluruhan dan tidak mengkaji secara mendalam klaster perlindungan khusus maupun menggunakan teori Mazmanian dan Sabatier. Penelitian oleh Namma & Setiamandani (2017) di Kota Malang memfokuskan kajiannya pada perspektif kesejahteraan sosial dalam pelaksanaan kebijakan KLA. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Dinas Sosial telah menjalankan tugas sesuai indikator kebijakan, pelaksanaan program masih terkendala oleh keterbatasan sarana, sumber daya manusia, serta minimnya partisipasi masyarakat. Pendekatan kesejahteraan sosial yang digunakan menjadi pembeda dari penelitian ini, yang lebih menekankan pada implementasi kebijakan publik menggunakan pendekatan Mazmanian dan Sabatier.

Berdasarkan hasil studi-studi terdahulu, dapat disimpulkan bahwa mayoritas hambatan implementasi kebijakan KLA berkaitan dengan koordinasi, kapasitas pelaksana, partisipasi masyarakat, serta sarana dan prasarana pendukung. Penelitian ini menempati posisi yang khas karena secara khusus meneliti implementasi kebijakan KLA pada Klaster Perlindungan Khusus di Kota Kendari, serta menggunakan teori implementasi Mazmanian dan Sabatier (1983) yang menyoroti tiga dimensi utama: karakteristik masalah, karakteristik kebijakan, dan lingkungan kebijakan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baru yang belum dikaji secara mendalam dalam penelitian sebelumnya.

#### **1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penelitian ini memiliki kebaruan ilmiah yang penting dalam pengembangan kajian implementasi kebijakan Kota Layak Anak (KLA), khususnya pada Klaster Perlindungan Khusus di Kota Kendari. Tidak seperti penelitian-penelitian sebelumnya yang cenderung membahas implementasi KLA secara umum atau dari sudut pandang klaster yang lebih luas, penelitian ini secara spesifik menelaah pelaksanaan kebijakan pada klaster yang menangani anak dalam situasi darurat, yakni Klaster Perlindungan Khusus. Perbedaan ini menjadi signifikan karena permasalahan kekerasan terhadap anak di Kota Kendari mengalami peningkatan setiap tahun meskipun kota ini telah menerima penghargaan sebagai Kota Layak Anak tingkat Nindya. Berbeda dengan penelitian Nurhayati et al (2024) yang berfokus pada

seluruh klaster KLA di Kota Makassar, serta penelitian Amir Mahmud & Suandi (2020) yang menggunakan teori Van Metter dan Van Horn dalam konteks Kota Palembang, penelitian ini mengadopsi teori implementasi Mazmanian dan Sabatier secara menyeluruh untuk menganalisis dimensi karakteristik masalah, karakteristik kebijakan, dan lingkungan kebijakan. Selain itu, tidak seperti penelitian Harianti et al (2020) yang juga dilakukan di Kota Kendari namun tanpa fokus klaster tertentu, penelitian ini mendalami pelaksanaan kebijakan secara lebih tajam pada aspek perlindungan anak dari kekerasan, eksploitasi, dan penelantaran. Fokus yang berbeda juga tampak pada penelitian Namma & Setiamandani (2017) yang melihat pelaksanaan KLA dari sudut pandang kesejahteraan sosial di Kota Malang, tanpa menelaah secara detail dinamika pelaksanaan kebijakan di klaster perlindungan khusus. Dengan demikian, penelitian ini membawa kebaruan ilmiah dalam hal fokus kajian, penggunaan teori yang spesifik dan sistematis, serta konteks permasalahan yang aktual dan relevan dengan kondisi Kota Kendari saat ini. Temuan penelitian ini diharapkan dapat mengisi celah kajian yang belum banyak dijelaskan dalam literatur kebijakan publik, sekaligus menjadi rekomendasi kebijakan yang lebih responsif terhadap perlindungan hak anak.

### **1.5 Tujuan**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan Kota Layak Anak pada Klaster Perlindungan Khusus di Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan kebijakan tersebut.

## **II. METODE**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode kualitatif dipilih karena sesuai untuk menggali secara mendalam implementasi kebijakan yang bersifat kompleks dan kontekstual, seperti pada Klaster Perlindungan Khusus dalam kebijakan Kota Layak Anak di Kota Kendari. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami secara menyeluruh proses, dinamika sosial, serta faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalan kebijakan berdasarkan realitas di lapangan. Sejalan dengan pendapat Moleong dalam (Nasution, 2023), metode kualitatif bertujuan memahami fenomena-fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, dan motivasi, dalam konteks yang alami, serta disajikan dalam bentuk narasi kata-kata, bukan angka. Pendekatan deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran konkret dan rinci mengenai bagaimana kebijakan Kota Layak Anak, khususnya pada Klaster Perlindungan Khusus, diimplementasikan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kendari. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk menguraikan proses pelaksanaan, tantangan, serta faktor pendukung dan penghambat dari kebijakan tersebut dengan tetap berlandaskan pada fakta yang diperoleh selama penelitian berlangsung.

Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi langsung di lapangan, wawancara mendalam dengan informan, dan dokumentasi, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen kebijakan, laporan tahunan instansi, berita, dan data statistik resmi terkait perlindungan anak di Kota Kendari. Teknik penentuan informan dilakukan dengan cara *purposive sampling* untuk memilih informan utama yang memiliki keterlibatan langsung dalam pelaksanaan kebijakan, seperti Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kepala Bidang Perlindungan Khusus Anak, dan staf teknis. Selanjutnya, *snowball sampling* digunakan apabila informasi dari informan awal dirasa belum mencukupi, maka peneliti mencari informan tambahan yang direkomendasikan oleh informan sebelumnya (Sugiyono, 2013). *Accidental sampling*, digunakan untuk memperoleh perspektif masyarakat secara umum, terutama dari korban atau

keluarga korban kekerasan anak yang dapat dijangkau secara kebetulan namun tetap sesuai dengan kriteria penelitian

.Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara, observasi, untuk memahami kondisi nyata dan interaksi sosial yang terjadi dalam masyarakat terkait implementasi kebijakan. Wawancara mendalam, dilakukan secara semi-terstruktur kepada informan kunci untuk menggali perspektif mereka mengenai proses, hambatan, dan dampak kebijakan KLA. Dokumentasi, berupa pengumpulan dokumen resmi seperti Perda, SK, laporan program, serta berita dan data kasus dari instansi terkait. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model interaktif dari Miles dan Huberman yang mencakup, reduksi data untuk menyederhanakan dan memilah data yang relevan dengan fokus penelitian. Selanjutnya, penyajian data untuk mengorganisasi data agar dapat ditarik kesimpulan dan terakhir dengan menggunakan penarikan kesimpulan dan verifikasi untuk menemukan makna dari data serta memverifikasi temuan melalui triangulasi (Leda, 2024). Dengan metode dan teknik yang digunakan, penelitian ini diharapkan mampu menjawab secara komprehensif bagaimana implementasi kebijakan Kota Layak Anak, khususnya pada Klaster Perlindungan Khusus, berjalan di Kota Kendari dan apa saja faktor yang memengaruhinya. Pendekatan kualitatif deskriptif dinilai tepat untuk menggambarkan secara detail kompleksitas sosial, kebijakan, serta respons masyarakat dan lembaga terhadap isu perlindungan anak.

### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1 Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak Klaster Perlindungan Khusus di Kota Kendari**

Implementasi kebijakan Kota Layak Anak (KLA) pada Klaster Perlindungan Khusus di Kota Kendari dalam penelitian ini dianalisis secara mendalam menggunakan teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Mazmanian & Sabatier (1983). Teori ini dipilih karena menyediakan kerangka analisis yang sistematis dan menyeluruh untuk menilai berbagai faktor yang memengaruhi keberhasilan suatu kebijakan publik. Teori tersebut mencakup tiga dimensi utama yang saling berkaitan, yaitu: karakteristik masalah, yang menyoroti tingkat kompleksitas teknis, sebaran pihak yang terdampak, serta urgensi penanganan isu; karakteristik kebijakan, yang mencakup kejelasan tujuan, struktur implementasi, dan ketersediaan sumber daya; serta lingkungan kebijakan, yang meliputi kondisi sosial, ekonomi, politik, serta dukungan dari aktor eksternal yang dapat memperkuat atau menghambat pelaksanaan kebijakan. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat menggambarkan secara utuh bagaimana kebijakan KLA pada klaster perlindungan khusus diterapkan di Kota Kendari, termasuk mengidentifikasi hambatan yang muncul di lapangan serta potensi yang dapat dioptimalkan untuk memperkuat perlindungan anak di daerah tersebut.

Dimensi pertama adalah karakteristik masalah (*tractability of the problem*), yang mengacu pada sejauh mana masalah kebijakan dapat diidentifikasi dan dipecahkan secara teknis. Dalam konteks Kota Layak Anak pada Klaster Perlindungan Khusus di Kota Kendari, karakteristik masalah sangat kompleks karena mencakup beragam bentuk kekerasan terhadap anak baik fisik, psikis, maupun seksual yang sering kali terjadi dalam lingkungan terdekat anak, seperti keluarga dan sekolah. Selain itu, korban kekerasan anak berasal dari berbagai kelompok usia dan latar belakang sosial ekonomi, sehingga penanganannya tidak bisa dilakukan secara seragam. Tingginya tingkat urgensi dan sensitivitas isu juga memperberat penanganan, karena menyangkut hak-hak dasar anak serta trauma jangka panjang. Kompleksitas ini semakin diperparah dengan rendahnya pelaporan kasus akibat budaya diam (*silence culture*) dan anggapan bahwa kekerasan anak adalah urusan domestik. Dengan demikian, masalah yang dihadapi dalam implementasi kebijakan ini memiliki tingkat *tractability* yang rendah, sehingga memerlukan pendekatan kebijakan yang komprehensif dan terintegrasi.

Dimensi kedua adalah karakteristik kebijakan (*ability of the statute to structure implementation*), yang mencerminkan seberapa jelas dan terukur kebijakan dirancang dalam bentuk peraturan, program, serta mekanisme pelaksanaannya. Di Kota Kendari, kebijakan KLA telah memiliki payung hukum berupa Peraturan Daerah No. 20 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Namun, peraturan ini belum sepenuhnya mampu mengatur secara rinci pembagian peran antarinstansi, indikator keberhasilan, serta mekanisme evaluasi yang terukur. Selain itu, pelaksanaan kebijakan juga menghadapi kendala struktural seperti keterbatasan anggaran, rendahnya kapasitas sumber daya manusia, kurangnya pelatihan teknis, serta minimnya fasilitas pendukung yang ramah anak. Struktur kelembagaan yang belum terkoordinasi dengan baik antara Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, serta aparat penegak hukum menyebabkan penanganan kasus berjalan lambat dan tidak terpadu. Hal ini menunjukkan bahwa karakteristik kebijakan yang ada belum sepenuhnya mampu menopang implementasi yang efektif di lapangan. Sejalan dengan hal ini, Adanma & Ogunbiyi (2024) menegaskan bahwa keberhasilan kebijakan sangat bergantung pada desain yang hati-hati dan implementasi yang disesuaikan dengan konteks lokal dan realitas yang dihadapi oleh setiap wilayah. Selain itu, pandangan Akram & Yang (2020) memperkuat bahwa keberhasilan kebijakan tidak cukup hanya dengan formulasi yang baik, tetapi juga bergantung pada sejauh mana implementasi dikelola secara efektif dan kontekstual di lapangan. Kondisi serupa juga ditemukan dalam studi oleh Ervanto et al (2022) yang menunjukkan bahwa ketiadaan SOP tertulis menyebabkan ketidakjelasan prosedur pelaksanaan kebijakan ketenagakerjaan, yang pada akhirnya menghambat efektivitas implementasi.

Dimensi ketiga adalah lingkungan kebijakan (*non-statutory variables affecting implementation*), yaitu kondisi sosial, ekonomi, politik, dan budaya masyarakat yang berada di luar substansi kebijakan, tetapi memiliki pengaruh signifikan terhadap keberhasilan implementasi. Dalam konteks Kota Kendari, implementasi kebijakan KLA dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal, seperti rendahnya kesadaran masyarakat terhadap isu perlindungan anak, stigma terhadap korban kekerasan, serta masih kuatnya pola pengasuhan otoriter di dalam keluarga. Di sisi lain, kondisi ekonomi keluarga yang rendah turut menjadi pemicu terjadinya kekerasan dan eksploitasi terhadap anak, karena anak kerap dilibatkan dalam pekerjaan rumah tangga atau bahkan menjadi korban kekerasan ekonomi. Sementara dari sisi politik, dukungan pemerintah daerah cukup tinggi, terbukti dari penghargaan KLA tingkat Nindya yang berhasil diraih. Namun, keberhasilan ini belum sepenuhnya disertai dengan upaya substantif dalam membangun budaya masyarakat yang peduli dan responsif terhadap perlindungan anak. Oleh karena itu, lingkungan kebijakan menjadi salah satu tantangan besar dalam mendorong efektivitas kebijakan KLA Klaster Perlindungan Khusus di Kota Kendari.

Selain itu, kondisi sosial dan ekonomi masyarakat di Kota Kendari turut memengaruhi efektivitas implementasi kebijakan perlindungan anak. Ketimpangan pemahaman terhadap pentingnya hak anak serta terbatasnya sumber daya menjadi faktor yang memperlambat pelaksanaan program secara merata. Hal ini sejalan dengan pandangan Bert et al (2022) yang menyatakan bahwa perbedaan kebijakan antarnegara diperlukan untuk menyesuaikan dengan realitas masing-masing, seperti sistem layanan, sumber daya ekonomi, dan ketersediaan vaksin yang tidak merata. Meskipun dalam konteks kebijakan kesehatan, kutipan ini relevan karena menunjukkan bahwa implementasi kebijakan publik termasuk perlindungan anak memerlukan penyesuaian dengan kondisi lokal yang kompleks dan tidak seragam. Sejalan dengan temuan ini, Okongwu (2021) menyatakan bahwa hukum saja tidak cukup untuk menghapus diskriminasi, karena norma budaya dan agama yang mengakar sering kali menjadi penghalang utama dalam implementasi kebijakan, termasuk kebijakan perlindungan anak. Selain itu, Lutfi et al (2019) menegaskan bahwa pendampingan psikososial belum berjalan efektif karena tidak

didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai serta masih rendahnya rasa kepedulian masyarakat terhadap anak korban kejahatan seksual.

### **3.2 Faktor Pendukung dalam Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak Klaster Perlindungan Khusus di Kota Kendari**

Pelaksanaan kebijakan Kota Layak Anak (KLA) Klaster Perlindungan Khusus di Kota Kendari didukung oleh berbagai faktor yang memperkuat kapasitas implementasi di tingkat lokal. Salah satu aspek yang paling krusial adalah adanya komitmen dari Pemerintah Kota Kendari, khususnya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), dalam menjalankan berbagai program dan kegiatan yang relevan dengan pemenuhan hak anak. Komitmen tersebut diwujudkan melalui pembentukan Gugus Tugas KLA, pengoperasian Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak, serta pendirian Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) yang menyediakan layanan edukasi dan konseling. Komitmen ini menjadi pondasi utama dalam upaya mengintegrasikan prinsip-prinsip perlindungan anak ke dalam kebijakan daerah dan aktivitas masyarakat.

Dukungan lintas sektor juga berperan signifikan dalam memperkuat implementasi kebijakan ini. Keterlibatan instansi seperti Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, lembaga penegak hukum, dan organisasi masyarakat sipil menunjukkan bahwa kebijakan KLA bersifat kolaboratif dan tidak hanya dilaksanakan oleh satu institusi saja. Sinergi antarlembaga ini mendorong pendekatan perlindungan anak yang lebih holistik, mulai dari aspek pencegahan hingga penanganan dan rehabilitasi. Informasi dari hasil wawancara memperlihatkan bahwa koordinasi lintas sektor telah memungkinkan pelaksanaan kegiatan perlindungan anak menjadi lebih terarah dan efektif di beberapa wilayah intervensi. Selain dukungan kelembagaan, kerangka regulasi juga memberikan kontribusi penting dalam memandu pelaksanaan kebijakan. Kota Kendari telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak sebagai landasan hukum dalam implementasi kebijakan KLA. Di tingkat nasional, pelaksanaan program KLA mengacu pada Peraturan Menteri PPPA Nomor 12 Tahun 2022 yang berisi indikator penilaian dan pedoman teknis penyelenggaraan. Keberadaan regulasi ini tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga memperjelas pembagian peran antaraktor, prosedur pelaksanaan, dan mekanisme evaluasi.

Dukungan dari masyarakat juga muncul sebagai salah satu faktor penguat implementasi kebijakan. Kesadaran warga Kota Kendari terhadap pentingnya perlindungan anak mulai meningkat, tercermin dari adanya partisipasi dalam pelaporan kasus kekerasan, keterlibatan dalam kegiatan sosialisasi, serta penerimaan positif terhadap program-program pemerintah yang berorientasi pada pemenuhan hak anak. Masyarakat dinilai mulai menyadari bahwa perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, keluarga, dan komunitas. Secara keseluruhan, keberhasilan parsial dalam pelaksanaan kebijakan KLA Klaster Perlindungan Khusus di Kota Kendari dipengaruhi oleh kombinasi antara komitmen pemerintah, dukungan lintas sektor, dasar hukum yang memadai, serta kesadaran kolektif masyarakat. Meskipun berbagai kendala masih dihadapi dalam pelaksanaannya, keberadaan faktor-faktor pendukung tersebut memberikan harapan positif bagi terwujudnya sistem perlindungan anak yang lebih efektif dan berkelanjutan di tingkat lokal.

Salah satu bentuk dukungan terhadap implementasi kebijakan perlindungan anak adalah tersedianya fasilitas layanan yang ramah anak, seperti ruang konseling, shelter, serta puskesmas dengan pendekatan pemulihan psikologis. Fasilitas-fasilitas ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat perlindungan, tetapi juga sebagai media pemulihan trauma bagi anak korban kekerasan. *Healing environment* adalah desain yang dapat memberikan perasaan untuk sembuh secara mental dan kebugaran jasmani dengan memadukan unsur indra, alam, dan psikologis (Limanov et al., 2022). Oleh karena itu, aspek desain lingkungan pelayanan yang

memperhatikan kenyamanan dan keamanan emosional anak menjadi bagian penting dalam keberhasilan pelaksanaan kebijakan KLA, khususnya pada klaster perlindungan khusus.

### **3.3 Faktor Penghambat dalam Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak Klaster Perlindungan Khusus di Kota Kendari**

Pelaksanaan kebijakan Kota Layak Anak (KLA) pada Klaster Perlindungan Khusus di Kota Kendari masih menghadapi berbagai tantangan yang menjadi penghambat dalam pencapaian tujuan kebijakan secara optimal. Meskipun terdapat dukungan regulatif dan komitmen dari pemerintah daerah, sejumlah faktor struktural, teknis, dan sosial menghambat efektivitas implementasi kebijakan tersebut. Salah satu hambatan utama yang ditemukan dalam pelaksanaan kebijakan ini adalah kurangnya pemerataan sosialisasi kebijakan kepada masyarakat. Meskipun terdapat kegiatan edukasi yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) dan mitra lainnya, namun kegiatan tersebut belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara merata. Hal ini berdampak pada rendahnya pemahaman masyarakat terhadap mekanisme perlindungan anak dan pentingnya pelaporan kasus kekerasan. Rendahnya literasi hukum di sebagian besar masyarakat menyebabkan banyak kasus kekerasan terhadap anak tidak dilaporkan, atau bahkan dianggap sebagai urusan privat yang tidak perlu diintervensi oleh pihak luar.

Selain itu, keterbatasan anggaran juga menjadi kendala signifikan. Program-program perlindungan anak, termasuk pelayanan pendampingan psikologis, fasilitas ramah anak, dan pelatihan bagi petugas lapangan, memerlukan dukungan dana yang cukup. Dalam kenyataannya, alokasi anggaran untuk perlindungan anak di Kota Kendari masih bersifat terbatas dan belum sepenuhnya proporsional dengan kebutuhan yang ada. Kondisi ini berdampak pada minimnya jumlah petugas lapangan yang terlatih, serta terbatasnya penyediaan sarana pendukung seperti rumah aman atau *shelter* khusus anak korban kekerasan.

Permasalahan lain yang turut menghambat pelaksanaan kebijakan adalah keterbatasan sumber daya manusia, baik dari segi jumlah maupun kapasitas. Banyak pelaksana program di lapangan belum memiliki kompetensi yang memadai dalam menangani anak korban kekerasan, terutama dalam aspek psikologis dan hukum. Hal ini mengakibatkan penanganan kasus menjadi kurang efektif, bahkan berisiko menimbulkan trauma lanjutan bagi korban. Kurangnya koordinasi antarinstansi juga teridentifikasi sebagai faktor penghambat dalam pelaksanaan kebijakan KLA. Meskipun terdapat Gugus Tugas KLA yang telah dibentuk, pelaksanaan program antarinstansi seperti Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, kepolisian, dan lembaga perlindungan anak belum berjalan secara terpadu. Beberapa kasus kekerasan masih ditangani secara sektoral tanpa mekanisme rujukan yang terpadu, sehingga proses penyelesaian kasus seringkali berlangsung lambat dan tidak berkelanjutan.

Faktor sosial dan budaya masyarakat juga turut memperkuat tantangan dalam pelaksanaan kebijakan ini. Masih terdapat pandangan budaya yang menormalisasi kekerasan terhadap anak, baik dalam bentuk fisik maupun psikis, sebagai bagian dari pola pengasuhan. Dalam konteks ini, masyarakat cenderung menoleransi tindakan kekerasan atas nama disiplin, sehingga pelaporan menjadi rendah dan intervensi pencegahan sulit dilakukan. Kombinasi dari rendahnya sosialisasi, terbatasnya anggaran dan SDM, lemahnya koordinasi lintas sektor, serta kuatnya pengaruh norma budaya yang tidak berpihak pada perlindungan anak menunjukkan bahwa implementasi kebijakan KLA Klaster Perlindungan Khusus di Kota Kendari masih menghadapi hambatan sistemik yang memerlukan pembenahan menyeluruh. Perbaikan pada aspek teknis, struktural, serta penguatan nilai-nilai perlindungan anak dalam masyarakat menjadi langkah penting untuk menjamin efektivitas kebijakan dalam jangka panjang.

### **3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Temuan utama dalam penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Kota Layak Anak (KLA) pada Klaster Perlindungan Khusus di Kota Kendari belum berjalan optimal. Hal ini ditunjukkan oleh masih tingginya angka kekerasan terhadap anak yang terus meningkat, terbatasnya pemanfaatan anggaran, lemahnya koordinasi antarsektor, serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pelaporan dan perlindungan anak. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Nurhayati et al (2024) yang menyatakan bahwa implementasi kebijakan KLA di Kota Makassar juga belum optimal, terutama karena faktor lingkungan kebijakan yang dipengaruhi oleh rendahnya kualitas sumber daya manusia dan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Sama halnya dengan kondisi di Kota Kendari, faktor sosial ekonomi dan ketimpangan informasi turut menjadi hambatan utama yang memperlambat efektivitas pelaksanaan program perlindungan anak.

Berbeda dengan temuan penelitian Mahmud & Suandi (2020) di Kota Palembang, yang menyebutkan bahwa implementasi KLA secara umum sudah berjalan baik meskipun masih menghadapi kendala dalam hal komunikasi dan koordinasi kelembagaan. Dalam konteks Kota Kendari, permasalahan komunikasi antarlembaga belum sepenuhnya teratasi, dan sinergi antarinstansi seperti DP3A, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan aparat hukum masih berjalan secara sektoral. Hal ini memperlihatkan bahwa meskipun secara regulatif telah ada struktur yang mendukung, namun pelaksanaannya belum terpadu. Temuan ini memperkuat hasil penelitian Elizabeth & Hidayat (2016) di Kota Bekasi yang menyatakan bahwa fasilitas dan perlindungan hukum terhadap anak masih menjadi kelemahan dalam pelaksanaan KLA. Penelitian Aulia mengonfirmasi bahwa di Kota Kendari, keterbatasan fasilitas seperti shelter anak dan tenaga pendamping profesional juga menjadi salah satu penghambat utama. Oleh karena itu, penanganan kasus kekerasan terhadap anak masih berlangsung lambat dan tidak menyeluruh.

Penelitian ini juga menolak sebagian temuan Harianti et al (2020) yang menunjukkan bahwa pelaksanaan KLA di Kota Kendari secara umum telah dilakukan dengan cukup baik. Perbedaan hasil ini kemungkinan disebabkan oleh perbedaan fokus penelitian. Penelitian Aulia secara spesifik menyoroti klaster perlindungan khusus, sedangkan penelitian Harianti lebih menekankan pada keseluruhan indikator KLA tanpa membedah klaster-klaster secara mendalam. Oleh karena itu, penelitian ini justru mengungkap bahwa pada klaster yang paling krusial, yakni perlindungan anak dalam situasi darurat masih terdapat celah implementatif yang signifikan. Sama halnya dengan temuan Namma & Setiamandani (2017) di Kota Malang, penelitian ini juga menemukan bahwa keterbatasan sarana dan partisipasi masyarakat merupakan hambatan utama dalam perlindungan anak. Namun, karakteristik objek penelitian yang berbeda menyebabkan intensitas hambatan yang ditemukan di Kota Kendari lebih dipengaruhi oleh rendahnya literasi masyarakat mengenai hak-hak anak dan kuatnya budaya patriarki yang menormalisasi kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga.

Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi empiris dalam memperjelas aspek implementatif kebijakan KLA secara lebih spesifik pada Klaster Perlindungan Khusus. Temuan ini tidak hanya mengonfirmasi, tetapi juga memperluas pemahaman terhadap tantangan implementasi kebijakan perlindungan anak di daerah yang secara administratif telah memperoleh penghargaan sebagai Kota Layak Anak, namun secara substantif masih menghadapi persoalan serius dalam pemenuhan hak-hak anak.

### **3.5 Diskusi Temuan Menarik Lainnya**

Selain temuan utama, penelitian ini juga menemukan hal-hal menarik yang menunjukkan adanya ketimpangan antara capaian administratif dan realitas perlindungan anak di lapangan. Meskipun Kota Kendari telah meraih penghargaan sebagai Kota Layak Anak tingkat Nindya, angka kekerasan terhadap anak justru masih tinggi, yang memperkuat temuan

Elizabeth & Hidayat (2016) tentang ketidaksesuaian antara penilaian formal dan kondisi faktual di daerah. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap isu perlindungan anak mulai tumbuh, berbeda dengan temuan Harianti et al (2020) yang menyatakan partisipasi masyarakat masih stagnan. Selain itu, distribusi program yang belum merata antara pusat kota dan wilayah pinggiran menunjukkan ketimpangan akses layanan, berbeda dengan hasil penelitian Mahmud & Suandi (2020) yang menemukan pemerataan program di Kota Palembang. Ketidaksesuaian latar belakang dan kompetensi petugas pelaksana kebijakan juga ditemukan, memperkuat penelitian Nurhayati et al (2024) yang menyoroti rendahnya kapasitas SDM. Di sisi lain, regulasi yang tersedia ternyata belum diiringi dengan sistem evaluasi dan kontrol yang kuat, sehingga pelaksanaan kebijakan tidak sepenuhnya sesuai dengan kerangka yang telah ditetapkan. Temuan-temuan ini menyoroti pentingnya perbaikan struktural, pemerataan layanan, dan penguatan kapasitas pelaksana agar kebijakan Kota Layak Anak benar-benar dapat melindungi anak secara menyeluruh dan tidak berhenti pada capaian administratif semata.

#### IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan Kota Layak Anak (KLA) pada Klaster Perlindungan Khusus di Kota Kendari belum berjalan secara optimal. Hal ini terlihat dari masih tingginya angka kekerasan terhadap anak, belum maksimalnya pemanfaatan anggaran, lemahnya koordinasi antarinstansi, serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan anak. Meskipun terdapat komitmen dari pemerintah daerah, dukungan regulasi, dan keterlibatan berbagai pihak, hambatan seperti keterbatasan sumber daya manusia, fasilitas yang belum memadai, dan ketimpangan distribusi layanan perlindungan anak menjadi tantangan utama. Oleh karena itu, implementasi kebijakan ini memerlukan upaya perbaikan yang lebih menyeluruh dan berkelanjutan agar dapat mewujudkan Kota Kendari sebagai Kota Layak Anak secara substantif, bukan hanya secara administratif.

**Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini memiliki sejumlah keterbatasan yang perlu diperhatikan dalam menilai hasil dan cakupan analisis. Ruang lingkup penelitian yang hanya terfokus pada Klaster Perlindungan Khusus dalam kebijakan Kota Layak Anak membatasi kajian terhadap aspek-aspek lain dalam kebijakan yang saling berkaitan, seperti klaster pendidikan, kesehatan, dan lingkungan. Selain itu, penggunaan metode pengumpulan data yang mengandalkan wawancara dari informan tertentu berpotensi menghasilkan bias karena informasi yang diperoleh sangat bergantung pada persepsi dan pengalaman subyektif masing-masing narasumber. Akses terhadap data internal instansi pelaksana juga terbatas, sehingga beberapa informasi strategis, terutama yang bersifat kuantitatif atau terkait evaluasi kinerja tahunan program, tidak dapat dikaji secara menyeluruh. Keterbatasan lain terletak pada rentang waktu pelaksanaan penelitian yang relatif singkat, yang berdampak pada kedalaman observasi dan triangulasi data di lapangan. Meskipun demikian, penelitian ini tetap memberikan gambaran empiris yang relevan dan dapat menjadi pijakan awal bagi penelitian lanjutan yang ingin mengeksplorasi pelaksanaan kebijakan Kota Layak Anak secara lebih luas dan komprehensif.

**Arah Masa Depan Penelitian (*future work*).** Arah masa depan penelitian terkait implementasi kebijakan Kota Layak Anak perlu difokuskan pada kajian yang lebih menyeluruh terhadap seluruh klaster kebijakan, agar dapat memberikan gambaran utuh mengenai integrasi antarprogram dalam mewujudkan perlindungan dan pemenuhan hak anak. Penelitian lanjutan juga dapat mengembangkan pendekatan campuran (*mixed methods*) untuk memperkuat validitas temuan melalui kombinasi data kualitatif dan kuantitatif, serta memperluas wilayah studi hingga tingkat kelurahan atau kecamatan guna melihat variasi implementasi kebijakan di tingkat akar rumput. Selain itu, penting untuk menggali peran aktor non-pemerintah, seperti

organisasi masyarakat sipil dan media, dalam memperkuat kontrol sosial dan advokasi perlindungan anak. Studi-studi mendatang diharapkan dapat memfokuskan analisis pada efektivitas kebijakan secara jangka panjang serta dampaknya terhadap perubahan perilaku sosial masyarakat dalam konteks perlindungan anak. Dianjurkan agar legislator memprioritaskan evaluasi dan revisi berkala terhadap kerangka hukum yang berlaku. Mengingat perubahan nilai-nilai sosial dan norma hak asasi manusia, evaluasi berkala diperlukan untuk menyelaraskan hukum dengan tantangan sistem peradilan pidana (Anwary, 2022).

## V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama peneliti tujukan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Kendari beserta seluruh jajarannya yang telah memberikan izin, dukungan, dan kesempatan kepada peneliti untuk melaksanakan penelitian ini. Peneliti juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program perlindungan anak, termasuk petugas UPTD, pihak sekolah, puskesmas, serta masyarakat Kota Kendari yang telah bersedia menjadi informan dan memberikan informasi penting selama proses pengumpulan data. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada dosen pembimbing, para penguji, teman-teman seperjuangan, serta keluarga yang senantiasa memberikan semangat, bantuan, dan motivasi, sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

- Abdi, A. (2024). *Perlindungan Anak di Indonesia*. Bumi Aksara.
- Adanma, U. M., & Ogunbiyi, E. O. (2024). A comparative review of global environmental policies for promoting sustainable development and economic growth. *International Journal of Applied Research in Social Sciences*, 6(5), 954–977. <https://doi.org/10.51594/ijarss.v6i5.1147>
- Akram, H., & Yang, Y. (2020). A critical analysis of the weak implementation causes on educational policies in Pakistan. *International Journal of English Linguistics*, 10(6), 335. <https://doi.org/10.5539/ijel.v10n6p335>
- Anwary, I. (2022). Evaluation of the Effectiveness of Public Administration Policies in the Development of Stringent Legal Framework: An Analysis of the Criminal Justice System in Indonesia. *International Journal of Criminal Justice Sciences*, 17(2). <https://doi.org/10.5281/zenodo.4756127/IJCJS>
- Bert, F., Scaioli, G., Vola, L., Accortanzo, D., Lo Moro, G., & Siliquini, R. (2022). Booster Doses of Anti COVID-19 Vaccines: An Overview of Implementation Policies among OECD and EU Countries. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 19(12), 7233. <https://doi.org/10.3390/ijerph19127233>
- Elizabeth, A., & Hidayat, Z. (2016). Implementasi Program Kota Layak Anak dalam Upaya Pemenuhan Hak-Hak Anak di Kota Bekasi. *Journal of Public Policy and Management*, 5(2). <https://doi.org/10.14710/jppmr.v5i2.10790>
- Ervanto, R. A., Tahir, I., & Lambelanova, R. (2022). Implementasi Kebijakan Ketenagakerjaan Di Kabupaten Bekasi. *Medium: Jurnal Ilmiah Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Riau*, 1(2), 338–355. <https://doi.org/https://doi.org/10.25105/psia.v4i1.16313>

- Harianti, P., Barlian, B., & Suaib, E. (2020). Analisis Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak Di Kota Kendari. . *Publica : Jurnal Administrasi Pembangunan Dan Kebijakan Publik*, 11(1), 147. <https://doi.org/https://doi.org/10.33772/publica.v11i1.13503>
- Leda, H. A. (2024, February 18). *Bagaimana Langkah-Langkah Analisis Kualitatif Menurut Miles dan Huberman*. Kompasiana. <https://www.kompasiana.com/hen12684/65cb3df7c57afb69cf72ee02/bagaimana-langkah-langkah-analisis-kualitatif-menurut-miles-dan-huberman>
- Limanov, Y. M., Prabowo, H., & Wijayanto, P. (2022). Keselamatan Proyek dan Kenyamanan Lingkungan Dalam Upaya Peningkatan Kualitas Hidup. *In Prosiding Seminar Intelektual Muda*, 4(1), 202–209. <https://doi.org/https://doi.org/10.25105/psia.v4i1.16313>
- Lutfi, M., Prabowo, H., & Hidayatullah, S. (2019). Pelaksanaan Perlindungan Hak Anak Korban Kejahatan Seksual Dalam Memperoleh Pendampingan Psikososial Di Kabupaten Kudus. *Jurnal Suara Keadilan*, 20(2), 101–115. <https://doi.org/https://doi.org/10.24176/sk.v20i2.5573>
- Mahmud, A., & Suandi. (2020). Implementasi Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) di Kota Palembang. *Jurnal Ilmu Administrasi Dan Studi Kebijakan*, 2(2), 36–52. <https://doi.org/https://doi.org/10.48093/jiask.v2i2.23>
- Mazmanian, D. A., & Sabatier, P. A. (1983). *Implementation and public policy*. Scott, Foresman.
- Namma, R. H., & Setiamandani, E. D. (2017). Implementasi Program Kebijakan Kota Layak Anak dalam Perspektif Kesejahteraan Sosial. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 6(3). <https://doi.org/https://doi.org/10.33366/jisip.v6i3.1455>
- Nasution, N. (2023). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Panduan Praktis Mahasiswa*. Pustaka Pelajar.
- Ningtyas, L. A. (2024). *Miris Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak di Kendari Meningkat Tiap Tahun*. <https://www.rri.co.id/daerah/843149/miris-kasus-kekerasan-perempuan-dan-anak-di-kendari-meningkat-tiap-tahun>
- Nurhayati, Aslinda, A., & Akib, H. (2024). Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak di Kota Makassar pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar. *Jurnal Paradigma Madani: Ilmu Sosial, Politik Dan Agama*, 11(2), 81–90. <https://eprints.unm.ac.id/19683/1/NURHAYATI%20%28JURNAL%20KOTA%20LAYAK%20ANAK%29.pdf>
- Okongwu, O. C. (2021). Are laws the appropriate solution: The need to adopt non-policy measures in aid of the implementation of sex discrimination laws in Nigeria. *International Journal of Discrimination and the Law*, 21(1), 26–46. <https://doi.org/10.1177/1358229120978915>
- Radar Sultra. (2021, July 29). *Kota Kendari Raih Penghargaan Kota Layak Anak Kategori Nindya 2021*. Radar Sultra . <https://radarsultra.co/18933-2/>
- Rizkiyani, T. (2023). Penyuluhan Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Anak Sejak Dini di SDN Sukamanah 1 Desa Sukamanah Kecamatan Tanara Kabupaten Serang. *PARADIGMA: BUSAPAKSA Sebagai Media Pendidikan Kekerasan Seksual Bagi Siswa Sekolah Dasar*, 1(1), 58–69. <https://repository.poltekesos.ac.id/bitstreams/f0ce30e0-8b89-4568-a8de-59327e26bb0b/download>

- Silaban, E. (2023, February 13). *Memutus Rantai Kekerasan Terhadap Anak*.  
<https://ombudsman.go.id/artikel/r/pwkinternal--memutus-rantai-kekerasan-terhadap-anak>
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Alfabeta .
- Yunus, S. R. (2024). *Sepekan di Kendari, Guru Cabuli Murid hingga Ayah Perkosa Anak*.  
<https://www.kompas.id/baca/nusantara/2024/09/07/sepekan-di-kendari-guru-cabuli-murid-hingga-ayah-perkosa-anak>

